



## **PAPUA DALAM PERJALANAN SEJARAH NUSANTARA**

**Rosmaida Sinaga<sup>1</sup>, Alexander<sup>2</sup>, Dina Sihite<sup>3</sup>, Salsa Bila Lubis<sup>4</sup>, Yenny Maharani Lubis<sup>5</sup>**

**Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia<sup>12345</sup>**

**rosmaidasinaga@unimed.ac.id<sup>1</sup>, alexanderamb17@gmail.com<sup>2</sup>,  
dinasihite84@gmail.com<sup>3</sup>, 22salsabilalbs@gmail.com<sup>4</sup>, yennymhranii1@gmail.com<sup>5</sup>**

Accepted: Jan, 12<sup>nd</sup> 2024 Published: Jan, 31<sup>st</sup> 2025

### **Abstract**

*Indonesia is an archipelagic country in which there are various ethnicities, cultures and histories. Society becomes a unified nation amidst ethnic, religious and cultural diversity. The diversity of the Indonesian nation should not be used as a reason for disintegration but rather as a cultural commitment to knowing, respecting and appreciating each other to strengthen and strengthen Indonesian unity. The historical journey of Papua and other ethnicities in the archipelago in the formation of Indonesia is important to explore to strengthen our unity and Indonesianness as a nation. The method used in this study is the historical method with heuristic, criticism or verification, interpretation and historiography stages. The research results show the historical journey of Papua in the context of the archipelago from the time of ancient kingdoms to the period of Dutch colonialism and the struggle for integration with Indonesia.*

**Key words:** History, Papua, Nusantara

**How to cite:** Sinaga. R., Alexander., Sihite. D., Lubis. S. B., Lubis. Y. M (2025) Papua Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (170-184)

\*Corresponding author:  
alexanderamb17@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)  
ISSN 2684-9607 (Online)

## INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara kepulauan yang di dalamnya terdapat beragam etnik, budaya, dan Sejarah. Para pendiri bangsa bersepakat untuk mengikat Masyarakat menjadi kesatuan bangsa di tengah keragaman etnis, agama dan budaya. Pemikiran para pendiri bangsa untuk menjadikan slogan Bhineka Tunggal Ika sebagai perekat persatuan bangsa di masa lampau lahir dari sebuah proses yang panjang melalui cucuran keringat, air mata, dan darah untuk mencapai kemerdekaan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Para pendiri bangsa menyadari keberagaman bangsa Indonesia, sehingga mereka bersepakat untuk menetapkan semboyan Bhineka Tunggal Ika untuk mengikat keberagaman bangsa Indonesia. Di Tengah keberagamannya, bangsa Indonesia menghadapi tantangan disintegrasi dari sekelompok Masyarakat. Tantangan disintegrasi semestinya diselesaikan dengan penuh kearifan yaitu bagaimana menjadi bangsa Indonesia secara ikhlas lahir-bathin. Perjalanan Sejarah Nusantara menegaskan keberagaman Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Keberagaman bangsa Indonesia semestinya tidak dijadikan sebagai dalil disintegrasi melainkan menjadi sebuah komitmen budaya saling mengenal, menghargai, dan mengapresiasi untuk mengokohkan dan menguatkan persatuan Indonesia. Perjalanan Sejarah Papua dan etnis-etnis lainnya di Nusantara dalam pembentukan Indonesia penting ditelusuri untuk menguatkan persatuan dan keindonesiaan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji Papua dalam perjalanan Sejarah Nusantara.

## METHODOLOGY

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah dengan tahapan heuristic, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Studi literature review menjadi bagian yang penting dalam mengupas permasalahan. Pertama, heuristic (mengumpulkan sumber), sumber tertulis menjadi fokus pada kajian ini. Terutama kajian terdahulu seperti; Rosmaida Sinaga (2013); Bernarda Meterai (2012), Taufik Abdullah, dkk. (2018). Inilah menjadi rujukan utama dalam kajian ini. Kedua, Kritik, sumber yang

telah diperoleh kemudian diverifikasi (kritik intern dan kritik ekstern), yaitu sumber yang diperoleh dicroscek kebenarannya, sesuai dengan spasial penelitian, dengan mempertimbangan fakta yang diutarakan. Ketiga, interpretasi, pada bagian ini menjadi penting, deskripsi, narasi, dan analisis. Keempat. Historiografi, semua interpretasi disajikan dalam bentuk narasi analisis. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan (Kuntowijoyo, 2005).

## RESULT & DISCUSSION

### 1. Papua dalam Perjalanan Sejarah Nusantara Masa Sriwijaya

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling tergantung satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan manusia dengan sesamanya menjadi salah satu faktor pendorong untuk menjalin hubungan dengan sesamanya, sehingga terjadi saling keterkaitan antara daerah-daerah di Kepulauan Nusantara. Hubungan antardaerah tentunya sudah berlangsung sejak wilayah Nusantara masih berada dalam zaman prasejarah. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti benda purbakala yang ditemukan.

Pada zaman Sejarah ditemukan bukti-bukti tertulis hubungan timbal-balik antara berbagai daerah di Kawasan Nusantara. Sebuah fakta historis dari masa lalu diketahui dari prasasti bahwa pada abad ke-7 Masehi Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat kekuasaan di Sumatera bagian Selatan. Prasasti-prasasti yang berkaitan Kerajaan Sriwijaya dan makna historis keberadaan Candi Borobudur di Jawa Tengah yang diperkirakan dibangun dinasti Sailendra pada abad ke-7 memunculkan perdebatan akademis antara Krom dengan Stutterheim "siapa yang menguasai siapa". De Casparis menyimpulkan bahwa kasus Borobudur bukanlah masalah kekuasaan "apakah Jawa menguasai Sumatera ataukah sebaliknya" tetapi merupakan peneguhan fakta historis tentang adanya hubungan dinasti dari kedua wilayah itu. Hubungan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang dengan wilayah Jawa Tengah sejak abad ke-VII sampai ke- IX hanyalah sebuah contoh tentang terjalannya saling keterkaitan Sejarah dari daerah-daerah di Kepulauan Nusantara (Taufik Abdullah, dkk., 2018: 97-98).

Catatan mengenai hubungan antara pulau-pulau utama di wilayah Nusantara dengan

Pulau Papua barulah ada pada abad ke-7. Pada abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya telah dikenal para pelayar dan pedagang Tiongkok. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya mengirimkan beberapa ekor burung cenderawasih ke Tiongkok. Papua merupakan satu-satunya pulau tempat burung cenderawasih ditemukan. Pulau Papua merupakan suatu taman surga yang dinamakan Janggi. Sekitar tahun 700 Masehi pedagang dari Persia dan Gujarat pernah singgah di Pulau Papua (yang mereka sebut Dwi Panta dan kadang juga Samudranta yang artinya ujung lautan) untuk mencari rempah-rempah (cengkeh dan pala) (Taufik Abdullah, dkk., 2018: 102-103). Pengiriman burung cenderawasih dari Kerajaan Sriwijaya ke Tiongkok membuktikan bahwa telah ada kontak antara penduduk di Pulau Papua dengan penduduk pulau-pulau lainnya di Nusantara.

## **2. Papua dalam Perjalanan Sejarah Nusantara Masa Majapahit**

Sumber Sejarah yang memberikan bukti adanya hubungan penduduk lokal Papua dengan penduduk dari wilayah barat Nusantara terdapat dalam Kitab Nagarakertagama yang ditulis pada tahun 1365 oleh pujangga Prapanca untuk Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Dari kitab tersebut diketahui bahwa pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ibukota Majapahit acapkali didatangi oleh berbagai kepala daerah dari berbagai wilayah Kepulauan Nusantara. Kehadiran mereka ke ibukota Majapahit untuk menyatakan diri tunduk pada maharaja serta mahapatihnya Gajah Mada. Kejayaan dan kekuasaan Majapahit mendorong kepala daerah yang berkepentingan dalam bidang perdagangan di perairan Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri dengan Negara Majapahit. Kepala-kepala daerah Maluku mengakui kedaulatan Majapahit atas daerah-daerah kekuasaannya yang antara lain meliputi Sebagian dari Pulau Papua. Pengakuan kedaulatan Majapahit atas berbagai wilayah Nusantara dinyatakan dalam Kitab Nagarakertagama (Rosmaida Sinaga, 2013: 34) sebagai berikut:

Sajak Nomor 49 dari Nagarakertagama

*"Mengisahkan Iking saka sanusa nusa  
Makassar, Butun, Banggawi, Kunir galiyu  
mewangi salaya sumba salat muar Muwah tikang  
I wandhanambwanathawa Maluku Onin Ri Serani  
timur makadhiningangaki nusa tutur."*

Terjemahan sajak Nomor 49

*"Tersebut pula pulau-pulau seperti Makassar,  
Buton, Banggawi Kunir, Galiyan, serta Selayar,  
Sumba, Solot, Muwar Lagi pula Wandan, Ambon  
atau Maluku, Wanin Seran, Timor dan pulau-pulau  
lainnya berdekatan."*

## **3. Papua dalam Perjalanan Sejarah Nusantara Masa Kerajaan Islam Nusantara**

Pada abad ke-16 sultan-sultan Maluku telah menanamkan pengaruhnya di wilayah barat Pulau Papua yaitu di Kepulauan Raja Ampat (Waigeo, Salawati, Misool dan Waigama). Raja Waigama dan raja Misool di bawah kekuasaan Sultan Bacan, sedangkan Pulau Waigeo dan Pulau Salawati menjadi rebutan sultan Ternate dan sultan Tidore. Persaingan di antara kedua kesultanan itu berdampak pada perluasan daerah kekuasaan kedua kesultanan tersebut. Sultan Ternate melebarkan melebarkan daerah kekuasaannya ke Sulawesi dan pulau-pulau di sebelah barat Halmahera, sedangkan Sultan Tidore melebarkan daerah kekuasaannya hingga ke Seram Timur, Papua bagian barat dan semua pulau-pulau di antara Papua dan Halmahera (Muridan S. Widjojo, 2009: 95-113; Clercq, 1893: 158-159).

Peningkatan permintaan terhadap rempah-rempah mendorong para pedagang dari Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah ke wilayah pantai barat Papua. Kepulauan Raja Ampat dan wilayah pantai barat Papua merupakan penghasil rempah-rempah. Salah satu wilayah penghasil rempah-rempah di wilayah pantai barat Papua adalah Fakfak. Rempah-rempah yang merupakan produk unggulan komoditi dagang dari Fakfak adalah pala.

Kepulauan Raja Ampat merupakan mata rantai penting dalam pelayaran niaga antara Kesultanan Tidore dan Papua. Sumber daya utama wilayah Raja Ampat adalah sagu yang dibawa ke Tidore bila penduduknya kekurangan sagu. Selain sagu, daerah Kepulauan Raja Ampat menghasilkan teripang dan penyu. Peningkatan permintaan atas teripang dan penyu menyebabkan Kepulauan Raja Ampat acapkali dikunjungi para pedagang yang berasal dari Seram Timur, Tidore dan Ternate, serta para pedagang dan nelayan dari Sulawesi Selatan. Mereka mencari teripang yang dijual kepada para pedagang Cina (Leirissa, 1996: 32).

Para pedagang yang berasal dari Kepulauan Maluku dan Sulawesi Selatan melakukan perdagangan barter dengan penduduk lokal Kepulauan Raja Ampat. Barang dagangan yang

dipertukarkan adalah gelang besi putih, piring dan guci dari porselin, dan kain Timor yang ditukar dengan teripang, penyu dan sagu. Para pedagang tersebut menetap untuk sementara sambil menunggu dagangannya habis terjual atau menunggu angin musim. Selama mereka bermukim di daerah tersebut kadang kala ada di antara mereka menikah dengan penduduk local. Pernikahan campur itu melahirkan anak-anak yang tidak memiliki tipe khusus seperti umumnya penduduk asli Papua yang berambut keriting dan berkulit hitam, melainkan kulit agak terang (eksotis) dan rambutnya ikal bahkan lurus. Perkawinan campur tersebut juga menyebabkan banyak dari penduduk local yang menganut agama Islam (Stibbe, 1919: 35).

Para pedagang Maluku yang berdagang ke kota-kota Pelabuhan di Pantai barat Papua selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Penyebaran agama Islam semakin massif melalui perkawinan campur antara pedagang dan penduduk setempat. Para pedagang melakukan perkawinan dengan kaum Perempuan setempat agar lebih mudah untuk mendapatkan pala dari wilayah itu. Demikian sebaliknya, kaum Perempuan asal Maluku dan Sulawesi serta Arab menikah dengan pemuda Fakfak yang memiliki hutan pala yang luas (Onim, 2006). Hubungan dagang menyebabkan terjalinnya hubungan sosial di antara penduduk Pantai barat Papua dengan wilayah Kepulauan Maluku dan Sulawesi Selatan. Dalam memori serah terima jabatan A.L. Vink dituliskan bahwa leluhur dari Raja Namatote dari Kaimana berdarah campuran Gorom. Hal senada juga dituliskan Kontrolir Fakfak A. Vesseur dalam memori serah terima jabatannya bahwa raja-raja di Semenanjung Onin semuanya berdarah campuran karena perkawinan campur dengan kaum perempuan dari Seram dan Buton. Kisah raja-raja di Semenanjung Onin yang semuanya berdarah campuran merupakan bukti Sejarah yang paling otentik tentang percampuran berbagai identitas kultural di wilayah Pantai barat Papua (Rosmaida Sinaga, 2013).

Peningkatan hubungan dagang antara Pantai barat Papua dengan wilayah di sebelah baratnya didukung oleh ketersediaan tiga pelabuhan alami yaitu Fakfak, Kokas dan Kaimana. Akibatnya Fakfak, Kokas dan Kaimana tumbuh menjadi kota dagang. Pertumbuhan kota-kota dagang tersebut didukung oleh hasil bumi dan laut yang laris untuk diperdagangkan dan keterlibatan penguasa lokal dalam jaringan perdagangan. Para pedagang dari luar Papua

membawa barang dagangan berupa kain, barang pecah belah dan tembikar. Para pedagang berasal dari Kepulauan Maluku (Seram dan Gorom) dan Pulau Sulawesi (Bugis-Makassar dan Buton) serta para pedagang asing seperti Cina dan Arab. Hasil bumi dari wilayah Semenanjung Onin yaitu: pala, kayu masohi, damar, teripang, dan burung cenderwasih. Pada abad 16-17, banyak kaum pendatang menetap di Kaimana, di antaranya: orang Cina, Buton, Timor, Arab dan Seram. Penduduk lokal wilayah itu menjual hasil produk hasil bumi baik yang dikumpulkan dari hutan maupun dari laut kepada para pedagang dari Cina, Arab dan pedagang yang berasal dari Kepulauan Maluku dan Sulawesi (Sinaga, 2013)

Iklim perdagangan yang relatif baik, menyebabkan wilayah Semenanjung Onin tidak hanya didatangi para pedagang, tetapi juga pendatang yang ingin mencari nafkah. Orang Kei dari Kepulauan Maluku bekerja sebagai tukang kayu, Orang Seram dan Gorom dari Kepulauan Maluku bekerja sebagai nelayan dan kelasi kapal, orang Buton dari Pulau Sulawesi Tenggara bekerja sebagai nelayan dan kuli pada pedagang-pedagang Cina. Orang Arab selain bekerja sebagai pedagang juga menjadi juru dakwah di Fakfak, Kokas dan Kaimana. Para pendatang yang berasal dari luar Papua berdagang dan menetap di wilayah Semenanjung Onin serta membentuk perkampungan sendiri berdasarkan etnis, sehingga di Fakfak, Kokas dan Kaimana ditemukan Kampung Cina, Kampung Seram dan Kampung Buton (Sinaga, 2013).

Hubungan dagang Pantai barat Papua dengan wilayah Kepulauan Nusantara dan luar negeri menyebabkan migrasi ke wilayah itu. Penduduk yang bermigrasi membawa serta berbagai atribut sosial dan atribut politik yang menjadi identitas kulturalnya masing-masing. Perjumpaan kelompok-kelompok yang memiliki identitas kultural yang berbeda menyebabkan "percampuran" berbagai identitas kultural dan perpindahan atribut politik seperti gelar bangsawan di wilayah Semenanjung Onin. Di setiap kampung di wilayah Semenanjung Onin memiliki pimpinannya sendiri yang disebut kapiten dan wakil kapiten. Kapiten memimpin sejumlah orang kuat yang suka berperang dan pandai berperang. Kapiten tunduk kepada pimpinan seorang kepala suku yang disebut mayor (Sinaga, 2013).

Hubungan dagang wilayah semenanjung Onin dengan wilayah luar Papua menyebabkan hubungan sosial di antara penduduk setempat dengan kaum pendatang dari luar Papua. Hubungan sosial itu meningkatkan kekerabatan

di antara mereka. Keekerabatan itu semakin meningkat dengan adanya perkawinan campur di antara penduduk setempat dengan pendatang dari luar wilayah itu. Raja-raja di Semenanjung Onin semuanya berdarah campuran, karena para raja di wilayah itu menikah dengan wanita dari Kepulauan Maluku dan Buton. Kisah raja-raja di Semenanjung Onin semuanya berdarah campuran adalah sebuah bukti sejarah yang paling otentik tentang percampuran kultural di wilayah itu. Selain itu, kawin mawin antara penduduk setempat dengan kaum pendatang melahirkan anak-anak yang tidak hanya memiliki tipe khusus seperti umumnya penduduk Papua yang berambut keriting dan berkulit hitam, melainkan kulitnya agak terang, dan rambutnya ikal atau bahkan lurus. Perkawinan campur tersebut menyebabkan banyak dari penduduk Semenanjung Onin yang menganut agama Islam. Identitas agama yang berbeda di antara penduduk wilayah Semenanjung Onin tidak membuat jarak di antara mereka. Identitas keluarga atau keekerabatan tetap menjadi pemersatu. Di Semenanjung Onin ada istilah agama keluarga yaitu sebutan untuk sebuah keyakinan penduduk di daerah itu yang menyatakan bahwa meskipun berbeda agama, mereka tetap satu keluarga. Penduduk Semenanjung Onin beranggapan bahwa orang dapat berganti agama, tetapi tidak mungkin mengganti keluarga. Keberadaan penduduk setempat yang menganut agama Islam di Semenanjung Onin merupakan bukti dari proses perjumpaan antar budaya antara penduduk setempat dengan para pendatang yang membawa ajaran agama Islam. Hal ini membuktikan wilayah Semenanjung Onin memiliki simpul-simpul sejarah dengan wilayah Indonesia lainnya jauh sebelum penegakan kekuasaan Belanda di Papua.

Hubungan antara Papua dan Maluku telah berlangsung jauh sebelum kedatangan Orang Eropa ke wilayah itu. Hubungan tersebut dapat dibuktikan dari penggunaan bahasa-bahasa di Halmahera dan Morotai yang mirip dengan bahasa-bahasa yang dipakai di Papua. Demikian sebaliknya, mobilitas penduduk antara Maluku dan Papua juga terlihat dari dipakainya bahasa-bahasa "non-Austronesian" di pulau-pulau seperti Timor, Alor dan Pantar. Perdagangan antar pulau, mulai didominasi oleh para pedagang rempah-rempah. Migrasi penduduk pada masa pra-kolonial sangat erat kaitannya dengan perdagangan. Pedagang dari luar Papua membentuk pemukiman di berbagai tempat

untuk menjalankan perdagangannya. Hubungan dagang dan politik antara wilayah Semenanjung Onin dan Kesultanan Tidore bertalian dengan eksistensi kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah Semenanjung Onin. Para raja dari wilayah tersebut menjalankan kekuasaan atas nama Sultan Tidore. Sebab, Sultan Tidore yang memberi gelar raja kepada para raja tersebut. Di Semenanjung Onin terdapat beberapa kerajaan yaitu Kerajaan Arguni, Sekar, Wertuwar, Patipi, Rumbati, Ati-ati, Fatagar, dan Namatota. Meskipun gelar raja diberikan, kenyataannya mereka hanyalah agen dagang dan pemungut pajak di wilayah kekuasaannya atas perintah dari Sultan Tidore. Hal ini berarti para raja di wilayah itu berperan sebagai makelar dagang antara penduduk setempat dan Sultan Tidore. Dengan demikian, fungsi raja yang terutama bukan di bidang politik, melainkan di bidang ekonomi untuk menunjang kepentingan Sultan Tidore. Sultan Tidore berupaya menjalin hubungan dagang dengan orang-orang yang dianggap menonjol di daerah itu. Mereka diangkat menjadi kepala adat oleh atau atas nama Sultan Tidore. Setelah pengangkatan itu, para kepala adat itu dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh kekuasaan dan menambah penghasilan Sultan Tidore (Sinaga, 2013). Hubungan Tidore dan Raja Ampat semakin intensif sejak VOC memperkuat kedudukan Tidore di kepulauan itu melalui perjanjian yang dibuat pada 1660 dan 1667. Perjanjian yang dibuat pada 1660 mengatur hak-hak Tidore atas penduduk dan wilayah Papua dan semua pulau di sekitarnya, yang mencakup hak monopoli perdagangannya. Perjanjian ini dituangkan dalam kontrak pada 1667. Berdasarkan perjanjian 1660 dan kontrak 1667 VOC menempatkan semua orang Papua di bawah kekuasaan Tidore. Berdasarkan kontrak tersebut, Tidore memperoleh hak monopoli perdagangan atas wilayah itu. Dengan penempatan penduduk dan wilayah Papua di bawah kekuasaan Sultan Tidore, penduduk wilayah itu wajib menyetorkan upeti kepada Sultan Tidore. Sultan Tidore melalui utusannya mengangkat para kepala adat di wilayah itu. Para kepala adat itu diangkat untuk mengumpulkan upeti. Kedaulatan Tidore atas wilayah Papua hanya sebatas kewajiban penduduk wilayah itu untuk membayar upeti yang didasarkan pada kekerasan dan dipertahankan melalui perompakan. Pengambilan upeti melalui hongi dilakukan atas nama sultan oleh para bawahannya, khususnya utusan raja Salawati dan Waigeo yang

kekuasaannya diakui lebih dari kekuasaan sultan. Sebagai balasannya, Sultan Tidore menganugerahkan gelar-gelar kehormatan kepada kepala adat penduduk wilayah itu. Garis kebijakan yang ditempuh VOC atas wilayah Papua adalah mendukung tuntutan Tidore atas semua aspek kehidupan penduduk wilayah itu. Pengakuan itu dimaksudkan agar negara-negara Eropa lainnya tidak dapat masuk ke Papua dan Belanda tidak mengeluarkan biaya untuk daerah itu. Hal ini berarti VOC menjalankan politik non-intervensi atas wilayah Papua. VOC menanamkan pengaruhnya atas Papua melalui perantara Tidore. Kebijakan ini diterapkan oleh Belanda karena pada waktu itu wilayah Papua dianggap tidak dapat memberikan keuntungan komersial bagi Belanda. Hal ini sesuai dengan teori imperialisme yang dikembangkan oleh Gallagher dan Robinson bahwa pada awalnya kekuatan kolonial mencari pengaruh melalui metode politik tidak langsung di daerah koloni. Pemerintah kolonial menghindari intervensi secara langsung. Hal ini berarti kekuasaan diterapkan secara informal selama kebijakan itu memungkinkan untuk dilaksanakan, namun dapat diubah dengan aneksasi formal jika diperlukan (Ardhana, 2005).

#### **4. Kehadiran Zending di Papua**

Penguasa Hindia Belanda di Batavia memberikan izin kepada Ottow dan Geissler untuk melakukan pekabaran injil. Namun, ijin yang diberikan itu hanya berlaku sampai di Ternate karena secara formal Sultan Tidore yang mempunyai kedaulatan atas penduduk dan wilayah Papua. Pada 9 Mei 1854 mereka bertolak dari Batavia menuju ke Ternate dan tiba pada 30 Mei 1854 di Ternate (Kamma, 1981). Setelah Ottow dan Geissler memperoleh izin dari Sultan Tidore, maka mereka segera memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Nieuw Guinea. Dengan menumpang kapal milik perusahaan dagang Van Duyvenbode di Ternate, pada tanggal 12 Januari 1855 Ottow dan Geissler berangkat menuju Nieuw Guinea, dan selama 24 hari mereka mengadakan perjalanan, pada tanggal 5 Februari 1855 mereka tiba di tempat yang dipilih sebagai pos pertama dari pekerjaan mereka di Nieuw Guinea, yaitu pulau Mansinam di teluk Doreh (Th. van den End dan J. Weitjens: 121).

Sultan Tidore memberikan surat jalan kepada kedua penginjil itu. Dalam surat jalan yang diberikan Sultan Tidore itu dituliskan bahwa kedua orang itu adalah Pendeta atau

Penginjil. Dalam surat itu juga ditulis bahwa sultan juga memerintahkan kepada kepala-kepala desa untuk memberi perlindungan kepada para zendeling ini, dan apabila mereka kekurangan bahan makanan, harus dibantu juga. Pemberian surat jalan dan isi surat jalan yang dikeluarkan Sultan Tidore membuktikan bahwa usaha pekabaran Injil di Papua tidak terlepas dari bantuan Sultan Tidore yang beragama Islam. Hal ini membuktikan toleransi beragama telah dijunjung tinggi Sultan Tidore.

Ottow dan Geissler tiba pada 5 Februari 1855 di Pulau Mansinam (Manokwari). Mereka membuka sekolah dasar yang pertama di Mansinam pada 1856 dan melakukan pengajaran kepada anak-anak Papua. Selain Ottow dan Geissler, zendeling dari Utecht juga masuk ke Papua untuk melakukan penginjilan. Kehadiran para zendeling dari Utrecht yang mengutamakan pengajaran berperan dalam meningkatkan jumlah sekolah di Papua. Pada tahun 1897 para zendeling telah membuka tujuh sekolah dasar (Sekolah Pengadaban). Adapun materi yang diajarkan adalah isi Kitab Suci, membaca, menulis, berhitung dan menyanyi. Dalam melaksanakan pengajaran di sekolah, para Zendeling itu dibantu oleh tenaga dari Maluku, Manado dan Sangir. Kehadiran tenaga pembantu para zendeling tersebut membuktikan bahwa kemajuan pendidikan di Papua tidak terlepas dari jasa saudaranya yang berasal dari Maluku dan Sulawesi. Dengan kehadiran guru-guru tersebut, orang Papua semakin banyak yang mengecap pendidikan. Pendidikan orang Papua semakin meningkat, seiring dengan pembukaan Sekolah Pendidikan Guru (Nomaalleergangen) di Mansinam. Di Sekolah Pendidikan Guru itu dididik murid-murid dari Ambon, Sangir dan beberapa orang Papua untuk menjadi guru bantu bagi sekolah-sekolah pengadaban/desa. Pada 1925 Sekolah Pendidikan Guru di Mansinam itu dipindahkan ke Mie (Teluk Wandamen) dan hanya diperuntukkan bagi orang Papua. Sekolah Guru tersebut berkembang pesat di bawah kepemimpinan guru yang penuh energi dan kompeten I.S. Kijne. Setiap tahun beberapa ratus pemuda Papua menikmati pendidikan lanjutan tersebut, yang merupakan pertumbuhan benih elite Papua. Pada umumnya siswa-siswi yang diterima di Sekolah Guru di Mie berasal dari bagian utara dan barat Papua, khususnya Manokwari, Biak, Numfor, Yapen Waropen, Wandamen, dan Hollandia. Sekolah Guru di Mie itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, seperti:

gedung sekolah, asrama yang lengkap dengan ruang tidur, kamar mandi dan kakus, ruang belajar, ruang makan, dapur, serta rumah guru. Kurikulum Sekolah Guru Desa di Mieï memuat pendidikan dasar guru, pendidikan agama, dan ilmu kemasyarakatan seperti pertanian dan pertukangan. Tanah di Mieï subur, sehingga para siswa dapat menggarap kebun sendiri. Selain itu, sekolah desa di Mieï dijadikan tempat latihan bagi calon guru. Melalui sekolah guru itu, I.S. Kijne berhasil menanamkan harga diri pada orang Papua, termasuk kesadaran sebagai suku bangsa, sehingga mereka percaya bahwa mereka mampu menjadi pemimpin di daerah mereka sendiri. Sebagai guru, I.S. Kijne memahami mitos dan agama orang Papua, serta mempelajari bahasa setempat. Dia mengajarkan cara berpikir, bekerja, dan menyanyi. Sejak 1923 hingga 1952 di Papua, I.S. Kijne telah menciptakan bahan bacaan dan lagu, termasuk yang mengacu kepada kearifan lokal, sehingga mudah dipahami para siswa. Lagu-lagu yang terdapat dalam buku bacaan *Seruling Emas* sampai saat ini masih dipakai di kalangan Gereja Kristen Injili (GKI) di Papua. Hal inilah yang membuat nama I.S. Kijne terpatri di sanubari orang Papua sebagai tokoh yang disegani karena kemampuannya mengungkapkan rahasia hidup orang Papua (Bernarda Meterai, 2012: 36-37).

Meskipun I.S. Kijne telah berupaya menyiapkan tenaga pribumi Papua, namun tenaga guru yang dibutuhkan untuk melayani penduduk di Papua masih mengalami kekurangan. Oleh karena itu, pihak zending mendatangkan bantuan tenaga dari Ambon dan Sangir, terutama yang berijazah sekolah guru. Para tenaga guru dari Ambon dan Sangir dikenal sebagai pionir-pionir yang bersedia untuk berkorban demi perintah pekabaran Injil dan pelayanan Pendidikan di Papua.

## **5. Papua dalam Perjalanan Sejarah Nusantara Masa Kolonialisme Belanda**

Pulau Nieuw Guinea terletak di antara 00 dan 120 Lintang Selatan sebelah utara Benua Australia dan sebelah barat daya Pasifik. Berdasarkan Perjanjian Den Haag 16 Mei 1895, pulau ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian barat milik Belanda dan bagian timur milik Inggris dan Jerman. Wilayah jajahan Belanda di Nieuw Guinea dinamakan *Nederlands Nieuw Guinea* (sekarang disebut Papua). Batas wilayah Papua dimulai dari sungai Benbach, di pantai selatan pulau itu yang terletak pada garis 1410 1'47'9 Bujur Timur dan melalui garis tersebut

ditarik lurus ke utara sampai di kelokan sungai Fly, dan terus sampai pada garis 1410 Bujur Timur yang terletak di pantai utara pulau itu (Rosmaida Sinaga, 2013: 183-205). Dengan penandatanganan Perjanjian Den Haag tersebut wilayah pulau itu dibagi-bagi oleh bangsa Inggris, bangsa Belanda dan bangsa Jerman tanpa pemberitahuan kepada penduduk setempat.

Walaupun Negara-negara Eropa telah menyepakati perjanjian Den Haag tentang pembagian atas wilayah Nieuw Guinea, namun Belanda masih menghindari intervensi secara langsung ke wilayah kekuasaannya itu. Pemerintah kolonial menjalankan pengaruhnya melalui politik tidak langsung di daerah itu. Oleh karena itu, Belanda memperkuat kedudukan Tidore di wilayah itu melalui perjanjian yang dibuat pada 1660. Perjanjian itu mengatur hak-hak Tidore atas penduduk dan wilayah Papua dan semua pulau di sekitarnya, yang mencakup hak monopoli perdagangannya. Perjanjian itu kemudian dituangkan dalam kontrak pada 1667. Hal ini berarti Belanda melalui VOC menempatkan semua orang Papua di bawah kekuasaan Tidore, sehingga Belanda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk daerah itu. Pengakuan itu juga dimaksudkan agar negara-negara Eropa lainnya tidak dapat masuk ke Papua dan menjadikannya sebagai pangkalan untuk bersaing dalam perdagangan rempah-rempah (Bone, 1958: 11 & 16).

Pada abad ke-19 negara-negara Barat saling berlomba untuk memperoleh tanah jajahan di Nieuw Guinea. Kondisi yang demikian menyebabkan perhatian Belanda semakin meningkat atas wilayah itu. Campur tangan langsung Belanda terhadap Papua dimulai dengan didirikannya Fort du Bus di Teluk Triton pada 24 Agustus 1828. Namun pendirian benteng itu tidak diikuti dengan pendirian pos-pos pemerintahan. Bahkan pada 1836 benteng itu terpaksa ditinggalkan karena mengganasnya penyakit malaria yang menyerang serdadu Belanda yang menjaga benteng itu. Sejak itu, hubungan pemerintah kolonial dengan penduduk wilayah itu dilakukan melalui perjalanan para pejabat dengan kapal-kapal perang untuk pengibaran bendera dan penempatan papan nama di berbagai tempat di wilayah itu. Namun, pemerintah kolonial Belanda tidak dapat mempertahankan kebijakan tersebut. Belanda berkeinginan untuk melakukan ekspansi ke Papua.

Adapun motivasi Belanda untuk melakukan ekspansi ke Papua adalah pertama, untuk

mencegah intervensi asing di Papua. Belanda mencurigai Inggris dan Perancis berkeinginan untuk melakukan intervensi di Papua. Kecurigaan itu muncul ketika Inggris yang pada tahun 1793 melabuhkan kapalnya di Teluk Doreh dan Perancis yang pada tahun 1827 mengunjungi Teluk Doreh) di Papua. Kedua, Belanda berupaya untuk melindungi kepentingannya di Maluku dengan mendirikan sebuah pos militer di Teluk Triton, Papua pada 24 Agustus 1828. Pembentukan pos militer itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih teratur di Papua agar perdagangan di Maluku berkembang pesat. Ketiga, Belanda mendukung pekabaran Injil di Papua. Para zendeling mengalami kesulitan untuk memberantas perang antar suku, perbudakan, pengayauan dan pembalasan dendam yang berlangsung di masyarakat Papua saat itu. Oleh karena itu, para zendeling bermohon agar pemerintah Belanda menegakkan pemerintahannya di Papua guna melakukan penegakan hukum dan ketertiban. Permohonan itu mendapat respon positif dari pemerintah dan parlemen di Negeri Belanda, sehingga disetujui untuk penegakan kekuasaan Belanda di wilayah itu. Keempat, Belanda berupaya untuk menertibkan pengayau dan perompak Suku Tugeri (Marind-Anim) yang acapkali melakukan pengayauan ke wilayah kekuasaan Inggris di Nieuw Guinea. Pemerintah Inggris mengancam akan menduduki wilayah kekuasaan Belanda di Papua apabila Belanda tidak mampu menertibkan Suku Tugeri. Untuk merespon ancaman Inggris itu, Belanda menegakkan kekuasaannya di Papua (Rosmaida Sinaga, 2013: 47-57).

Dalam rangka mempersiapkan penegakan kekuasaannya di Papua, pemerintah Belanda melakukan penjajakan wilayah untuk menentukan tempat pemukiman para aparat pemerintah, pembenahan hubungan transportasi dan komunikasi dari dan ke Papua, dan perekrutan aparat pemerintah sipil dan militer serta penetapan batas-batas wilayah kekuasaan para kontrolir yang ditugaskan di Papua. Pembenahan hubungan transportasi dan komunikasi dari dan ke Papua dimaksudkan untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi ke wilayah-wilayah yang menjadi pos pemerintahan dan meningkatkan perdagangan di wilayah Papua. Pemilihan pusat pemerintahan di Papua didasarkan atas pertimbangan geografis, ekonomis dan akses transportasi. Selain itu, pemilihan lokasi tempat kedudukan para kontrolir di Papua juga

bertalian dengan perannya sebagai pengawas atas para pedagang asing di wilayah kekuasaannya. Sementara itu, persyaratan pemilihan aparat pemerintah sipil dan militer yang diutamakan selalu orang yang mempunyai pengalaman dalam pekerjaannya dan mengenal wilayah tugasnya, memiliki ambisi dan semangat pengabdian yang tinggi. Penetapan syarat-syarat tersebut dimaksudkan agar personil pegawai yang ditempatkan di Papua dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di medan kerja yang berat di pos-pos pemerintahan yang baru dibuka. Setelah semua persiapan pembukaan pemerintah dianggap tuntas, Belanda segera melakukan penegakan pemerintahannya di Papua (Rosmaida Sinaga, 2013: 57-67).

Gubernur Jenderal menetapkan kedudukan kontrolir Afdeeling Nieuw Guinea Utara di Manokwari di daerah Teluk Doreh dan kontrolir Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan di Fak-Fak di daerah Kapaur. Untuk kepentingan tugas kedua kontrolir itu, Gubernur Jenderal menugaskan awak kapal uap dan menempatkan Korps Aparat Kepolisian Bersenjata di kedua afdeeling itu. Selanjutnya Residen Ternate Dr. Horst melantik Kontrolir L.A. van Oosterzee pada 8 November 1898 sebagai kontrolir pertama untuk Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan pada 1 Desember 1898 Kontrolir J.A. Kroesen sebagai kontrolir pertama untuk Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan. Dengan pelantikan kedua kontrolir tersebut berarti pemerintahan kolonial Belanda secara langsung telah ditegakkan di Papua (Rosmaida Sinaga, 2013).

Meskipun Pemerintah Kolonial Belanda telah ditegakkan di Papua, tetapi keamanan dan ketertiban masih sulit ditegakkan di daerah perbatasan wilayah kekuasaan Belanda dan Inggris di Papua bagian selatan. Suku Tugeri yang merupakan penduduk di wilayah kekuasaan Belanda, melakukan pengayauan dan perampokan ke wilayah New Guinea Inggris. Untuk menertibkannya, Belanda memekarkan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan menjadi dua Afdeeling yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Afdeeling Nieuw Guinea Selatan. Pemisahan afdeeling itu merupakan awal dibukanya pos pemerintahannya di Papua bagian selatan pada 18 Juni 1901. Pembukaan pos itu bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah terhadap penduduk di wilayah itu. Selain itu, pos pemerintahan Belanda di Papua bagian selatan untuk membuktikan kepada pemerintah Inggris bahwa Belanda bersungguh-sungguh mencegah pelayaran perompakan dan

pengayauan Suku Tugeri. Dengan demikian pemekaran wilayah pemerintahan itu merupakan politik pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas kontrol pemerintah terhadap penduduk koloni.

Setelah Perang Dunia I Belanda meningkatkan status ketiga afdeeling di Papua menjadi Karesidenan Nieuw Guinea dilaksanakan pada 17 Maret 1920. Peningkatan status tersebut dimaksudkan untuk penegasan kekuasaan Belanda di Papua. Penegasan kekuasaan itu bertalian dengan lenyapnya kekuasaan Jerman di Pulau New Guinea. Dengan demikian peningkatan status wilayah jajahan Belanda di Papua didasarkan pada pertimbangan politis. Namun, pada 1923 Karesidenan New Guinea dihapuskan dengan pertimbangan untuk menghemat biaya pelaksanaan pemerintahan. Kebijakan pemerintah Belanda tersebut membuktikan bahwa penentuan status wilayah pemerintahan di Papua juga didasarkan pada pertimbangan nilai ekonomis wilayah tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada 1925, status ketiga afdeeling yang ada di wilayah jajahan Belanda di Papua diturunkan menjadi onderafdeeling karena kemerosotan kas daerah itu. Kemerosotan kas daerah tersebut disebabkan dilakukannya larangan perburuan burung cenderawasih sejak tahun 1922 (Rosmaida Sinaga, 2013: 156-65).

Kemerosotan kas daerah jajahan Belanda di Papua menyebabkan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Afdeeling Nieuw Guinea Utara digabungkan menjadi satu afdeeling yang dinamakan Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Barat. Sementara itu Onderafdeeling Nieuw Guinea Selatan dan Onderafdeeling Boven Digul ditempatkan di bawah Afdeeling Tual. Penempatan kedua onderafdeeling itu di bawah Afdeeling Tual karena wilayah Afdeeling Tual terlalu kecil dan hubungan misionaris yang berkarya di kedua onderafdeeling itu dengan Vikariat Apostolik Tual telah terjalin dengan baik. Demikian juga hubungan asisten residen Tual dengan Vikariat Apostolik di Tual telah terjalin dengan baik. Artinya, penataan wilayah itu didasarkan pada persamaan budaya (mayoritas penduduknya beragama Katolik) dan hubungan baik antara pemerintah dan misionaris yang berkarya di wilayah itu. Pada tahun 1936 pemerintah Belanda melakukan penataan wilayah kekuasaannya di Papua menjadi dua afdeeling yaitu Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan. Namun pada 1937 dilakukan

kembali penataan dengan memisahkan Afdeeling Nieuw Guinea Barat dari wilayah Nieuw Guinea Selatan. Pengembalian status Afdeeling Nieuw Guinea Barat itu berkaitan dengan meningkatnya aktivitas eksplorasi minyak swasta yang dikerjakan oleh Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) di Babo. Hal ini berarti pengembalian status Afdeeling Nieuw Guinea Barat berkaitan dengan nilai ekonomis wilayah itu (Rosmaida Sinaga, 2013).

Seusai Perang Dunia II status pemerintahan kolonial Belanda di Papua diubah menjadi karesidenan tersendiri pada 15 Juli 1946. Hal ini dimaksudkan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Papua yaitu menjadikan wilayah itu sebagai tempat penampungan Indo-Belanda dan para pengusaha Belanda yang meninggalkan Indonesia yang telah merdeka serta untuk mendukung kegiatan zendeng dan missionaris di wilayah itu. Pada 1949 status wilayah Papua ditingkatkan menjadi gubernemen. Perubahan status itu berkaitan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Sejak itu pemerintahan di Papua dilaksanakan atas nama Ratu Belanda dan menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Sejak Papua menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, Belanda secara aktif memperluas pengaruhnya melalui pembukaan pos pemerintahan di Pegunungan Tengah yaitu di Enarotali pada April 1952 dan di Lembah Baliem pada 10 Desember 1956. Pembangunan pos pemerintahan di wilayah Pegunungan Tengah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan penduduk dan wilayah itu serta untuk menghindari publisitas negatif di tingkat internasional tentang perang suku. Pemerintah Belanda secara aktif memekarkan wilayah pemerintahannya di Papua hingga akhir kekuasaannya di Papua pada 1962 (Rosmaida Sinaga, 2013: 183).

## **6. Keinginan Belanda Menguasai Papua dan Kegigihan Pejuang Integrasi Papua**

Jauh sebelum Perang Dunia II, Papua telah direncanakan sebagai daerah penampungan kaum Indo Belanda yang merasa terdesak kedudukannya dalam masyarakat Indonesia dan mencari jalan keluar dengan mencari suatu daerah yang keadaan masyarakatnya belum maju dan tak membahayakan kedudukannya. Daerah yang dimaksud tersebut adalah Papua, yang diharapkan dapat menjadi tanah air yang baru bagi kaum Indo Belanda. Manokwari sebagai basis pemerintahan kolonial Belanda di Papua merupakan sasaran pertama transmigrasi kaum

Indo, namun mengalami kegagalan, sehingga dipindahkan ke Ransiki (Manokwari), dan terakhir di sekitar danau Sentani (daerah Hollandia atau Jayapura sekarang). Ternyata harapan untuk menjadikan Papua sebagai tanah air baru bagi Kaum Indo Belanda tidak terpenuhi (Bone, 1958: 22-23).

Pemindahan Kaum Indo Belanda ke Papua kembali digiatkan usai Perang Dunia II. Belanda berkeinginan untuk memindahkan petani totok Belanda ke Papua untuk mewujudkan cita-cita mendirikan "Holland di daerah tropika". Namun akibat syarat-syarat yang diajukan para calon transmigran sangat berat serta biaya yang dibutuhkan sangat besar, maka program itu mengalami kegagalan. Kegagalan pemerintah Belanda dalam menjadikan Papua sebagai Holland di daerah Tropika mengakibatkan Belanda mengubah kebijakannya yaitu mengikutsertakan penduduk asli dalam usaha pemerintahan. Menindaklanjuti kebijakan tersebut pada 1944 Resident J.P. van Eechoud mendirikan sebuah sekolah Polisi dan sebuah sekolah Pamongpraja (*bestuurshool*) di Hollandia, dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944 sampai tahun 1949. Sekolah inilah yang melahirkan elit politik terdidik (*bourgeois kecil terdidik*) di *Nederlands Nieuw Guinea*. Van Eechoud mempunyai misi khusus untuk menanamkan nasionalisme Papua dan membuat orang Papua setia kepada pemerintah Belanda (Djopari 1983: 30).

Menindaklanjuti pelaksanaan ide pemerintahan sendiri, pada 18-25 Februari 1961 diselenggarakan pemilihan umum untuk dewan *Nieuw Guinea* (*Nieuw Guinea Raad*). Aktivitas partai politik dalam rangka pemilihan tersebut menonjol terutama di Hollandia dan Manokwari, sebab di kedua tempat tersebut banyak berdomisili orang-orang Belanda, Indo-Belanda, Indonesia (Ambon, Manado, Jawa, Makassar, Bugis, Buton) serta kader-kader Papua yang terdidik. Pada 5 April 1961 *Nieuw Guinea Raad* diresmikan atau diberi kewenangan hak petisi atau mengajukan permohonan, hak interpelasi atau meminta keterangan, menyampaikan nasehat tentang undang-undang dan peraturan umum pemerintah, tugas bantuan berdasarkan hak amandemen/ usul perubahan terhadap ketentuan *ordonansi-ordonansi*, tugas bantuan terhadap pelaksanaan dari anggaran yang berhubungan dengan tinjauan dan pengamatan pada umumnya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa *Nieuw Guinea Raad* memiliki kekuasaan legislative bersama dengan

pemerintah dan melaksanakan beberapa pengawasan terhadap anggaran belanja. Dalam perencanaan pembentukan *Nieuw Guinea Raad*, Belanda menyadari bahwa lembaga itu pada awalnya mempunyai sarana latihan demokrasi. Pada 1960 telah dibentuk sebuah *battalion sukarelawan Papua* (*Papua Vrijwilligers Korps*) dan berkedudukan di Arfai-Manokwari. Setelah pembentukan *Nieuw Guinea Raad*, maka pada awal 1962 dilanjutkan dengan pembentukan 10 dewan daerah (*streekraad*). Implementasi dari "demokrasi colonial" ini bertujuan untuk menindas perasaan-perasaan pro Indonesia (Djopari, 1983: 34-35).

Memuncaknya perdebatan antara Indonesia dan Belanda di PBB mengenai status Papua menyebabkan Belanda melalui anggota-anggota dewan *Nieuw Guinea* untuk mempercepat ide *selfdetermination* dan melalui pembentukan Komite Nasional Papua (KNP) pada 19 Oktober 1961. Komite Nasional Papua menyampaikan pernyataannya kepada Dewan *Nieuw Guinea* yang berisi:

1. Menentukan Bendera Papua
2. Lagu kebangsaan Papua
3. Mengganti nama West *Nieuw Guinea* menjadi Papua Barat
4. Nama Bangsa ialah Papua
5. Mengusulkan bendera yang dikibarkan pada 1 November 1961

Sidang Dewan *Nieuw Guinea* menyetujui pernyataan Komite Nasional Papua, kecuali pengibaran bendera Papua pada 1 November 1961, masih menunggu keputusan dari *Nederland*. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan pengibaran Bendera Papua pada 1 Desember 1961 (Bagian Penerangan Kemendagri, 1961: 25-36).

Partai-partai yang berkembang di Papua dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama, partai yang menginginkan berdirinya Negara Papua sebagai Negara bagian sendiri. Kedua, yang menginginkan Papua barat tetap bergabung dalam Uni *Nederlands*, mengingat rakyat Papua belum mampu untuk memerintah. Ketiga, yang menginginkan terbentuknya Negara Papua dalam kerangka Federasi Melanesia. Keempat, yang menginginkan Papua bergabung dengan pemerintah Indonesia. Partai-partai yang berhaluan dengan politik Belanda kebanyakan terdapat di Pantai Utara, yang anggotanya terdiri dari golongan-golongan yang duduk dalam pemerintahan. Berbeda dengan kondisi masyarakat yang mendiami Pantai Selatan yang pengetahuan masyarakatnya masih sangat

terbatas menyebabkan partai-partai yang berhaluan kepada politik Belanda relatif sedikit.

Klimaks konflik antara Indonesia dengan Belanda mengenai satatus Irian Barat (sekarang disebut Papua) terjadi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 1949. Dalam konferensi tersebut Belanda menyatakan argumennya bahwa pemerintah Indonesia tidak mempunyai dasar yang kuat dalam mengklaim Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Argumen Belanda ini didasarkan atas perbedaan budaya, agama (orang Irian mayoritas menganut agama Kristen, dan etnis orang Papua tergolong ras Melanesia). Oleh karena itu, Irian Barat tidak bisa digabungkan ke Indonesia, tetapi harus diberi kedudukan tersendiri. Di lain pihak, Indonesia mengklaim Irian sebagai bagian dari kekuasaannya karena menurut pemerintah Indonesia, wilayah Indonesia adalah seluruh bekas wilayah pemerintahan Hindia Belanda, sehingga secara langsung Irian Barat menjadi bagian Indonesia.

Perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar berakhir dengan ditundanya satu tahun pembicaraan tentang status politik Irian Barat. Setahun kemudian tepatnya pada 15 Juli 1946 diadakan Konferensi Malino di Sulawesi. Menurut van Mook, konsep Negara federal ditawarkan untuk menjamin eksistensi kelompok minoritas agama dan etnis, sehingga dominasi satu bagian ke bagian lainnya dapat dihindarkan. Perbedaan pandangan yang berkepanjangan antara Indonesia dan Belanda tentang siapa yang berdaulat atas Irian Barat menyebabkan kedua belah pihak menempuh cara-cara yang bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing. Indonesia menempuh cara diplomasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun bila tidak berhasil maka cara berikutnya yang ditempuh Indonesia adalah konfrontasi militer. Pengembalian Irian Barat telah menjadi program beberapa kabinet. Dalam tahun 1950-an usaha lebih banyak dilakukan melalui forum-forum diplomasi. Namun dalam kurun waktu 1960-an, setelah gangguan keamanan nasional teratasi, kampanye militer mulai diadakan (Nazaruddin Sjamsudin, 1989: 91).

Belanda tetap berusaha melepaskan Irian Barat dari Indonesia dengan berbagai upaya. Pada 23 Agustus 1956 Belanda memasukkan Irian Barat sebagai salah satu bagian wilayahnya bersama-sama dengan Nederland, Kepulauan Antilen, Kurusua, dan Suriname. Strategi yang

ditempuh Belanda adalah memberikan janji kemerdekaan bagi Irian Barat. Realisasi dari janji tersebut, Belanda mendirikan Nieuw Guinea Raad (Dewan New Guinea). Untuk mempercepat pertumbuhan Nieuw Guinea Raad, menjelang akhir tahun 1960-an Belanda membentuk beberapa partai dan organisasi atau gerakan politik. Pembentukan partai-partai dan organisasi politik tersebut merupakan realisasi dan sebagai perwujudan dari kebijakan politik cabinet De Quay yaitu dekolonisasi untuk New Guinea (Djopari, 1993: 33).

Keinginan Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia tidak terlepas dari kepentingan Belanda atas Irian Barat, yaitu: (1) menjadikan Irian Barat sebagai tempat penampungan bagi keturunan Indo Belanda yang tidak dapat kembali ke Belanda; (2) Tempat penampungan para pengusaha Belanda yang tinggal di sana; (3) Sebagai basis pertahanan untuk kemungkinan intervensi militer Indonesia, apabila Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya hancur; (4) Keinginan untuk meneruskan misi agama (zending dan misi) di Irian Barat; (5) Menjadikan Irian Barat sebagai pangkalan kekuasaan Belanda di Fasifik (Bone, 1958: 22-23).

Belanda mempertahankan kepentingannya di Irian Barat. Bahkan sejak berlangsungnya Persetujuan Linggarjati, Belanda menjajaki kemungkinan dekolonisasi Irian Barat. Sebagaimana disampaikan Menteri Jajahan, M.A Jonkman di depan Parlemenn Belanda pada 10 Desember 1946 yang berisi tafsiran sepihak mengenai pasal-pasal Persetujuan Linggarjati, Belanda mengatakan bahwa Irian Barat tidak akan diserahkan kepada Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat, sebab masyarakat Irian Barat maasih sangat terbelakang. Oleh Belanda bermaksud memberikan sttus khusus kepada Irian Barat, kemudian akan dipertimbangkan apakah Irian Barat akan dimasukkan dalam dam Uni Indonesia-Belanda atau mempunyai status tersendiri. Pernyataan ini bertentangan dengan pasal 3 Persetujuan Linggarjati yang memuat bahwa wilayah Negara Indonesia Serikat meliputi wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Irian Barat. Dalam Konferensi Malino yang berlangsung dari 16-24 Juli 194, van Mook menjelaskan bahwa konferensi bertujuan untuk merencanakan dan merundingkan tindakan-tindakan yang yang layak diambil dalam rangka menyusun suatu pemerintahann dan pembangunan ketatanegaraan di wilayah itu di

mana putra-putri Indonesia akan mengambil bagian yang penting. Konferensi Malino dihadiri oleh para peserta dari luar Jawa dan Madura termasuk utusan dari Irian Barat yaitu Frans Kaisepo (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: 103 & 135). Kehadiran Frans Kaisepo pada konferensi ini mempunyai arti penting karena inilah pertama kalinya wakil dari Irian Barat duduk bersama-sama dengan wakil dari Indonesia untuk membicarakan masa depan Indonesia. Pada kesempatan tersebut Kaisepo mengusulkan penggunaan kata Irian untuk mengganti nama Papua yang selama ini kata tersebut sering dianggap merendahkan martabat orang Irian. Dalam konferensi di Malino dijelaskan oleh van Mook bahwa tujuan konferensi adalah membicarakan masalah bentuk ketatanegaraan wilayah Indonesia di masa datang. Van mook mengusulkan agar dibentuk suatu Negara yang berbentuk federasi, terdiri dari sejumlah Negara bagian yang tergabung menjadi satu keasatuan. Negara yang akan dibentuk itu meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Timur Besar. Usul ini diterima para peserta konferensi. Konferensi ini berdampak terhadap kedudukan Irian Barat dalam gelanggang politik karena pada konferensi inilah diletakkan dasar-dasar pemecahan wilayah Indonesia. Pemecahan wilayah Indonesia memberi kemungkinan kepada pihak Belanda untuk memisahkan daerah Irian Barat dari daerah Indonesia lainnya. Hal mana terbukti pada 15 Juli 1946 seluruh daerah Irian Barat dinyatakan sebagai suatu keresidenan tersendiri dan diangkat Jan van Eechoud sebagai residen. Pembentukan Keresidenan Irian Barat, terlepas dari keresidenan Maluku, terjadi tanpa menyolok mata karena diadakan dalam rangka perubahan pemerintahan. Sejak saat itu, menurut Belanda kedudukan Irian Barat merupakan kesatuan politik yang berdiri sendiri. Oleh karena itu pada konferensi atau perundingan-perundingan selanjutnya wakil dari Irian Barat tidak lagi diikutsertakan bahkan dalam konferensi Linggajati yang berlangsung pada Nopember 1946 secara spesifik tidak menyinggung status Irian Barat. Namun secara implisit terdapat pada artikel 3 Linggajati yang memuat bahwa Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari seluruh wilayah Nederlands-Indie. Belanda bermaksud memberikan status khusus kepada Irian Barat untuk kemudian dipertimbangkan apakah dimasukkan dalam uni Indonesia-Belanda atau mempunyai status tersendiri.

Van Mook berencana mengubah ketatanegaraan Indonesia sehingga pada 1 Oktober 1946 di Pangkal Pinang diadakan suatu konferensi dari sejumlah golongan minoritas. Sejumlah peserta menyatakan kekuatirannya tentang kedudukan mereka dalam susunan ketatanegaraan Indonesia di masa depan. Golongan peranakan Belanda mengusulkan untuk menjadikan daerah Irian Barat sebagai tempat kediaman baru dari golongan penduduk yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Berdasarkan usul tersebut, dalam suatu mosi yang diterima pada siding terakhir, para peserta mengusulkan agar Irian Barat diberikan status politik tersendiri, lepas dari Indonesia, masuk ke dalam kerajaan Belanda. Permohonan golongan peranakan Belanda ini mendapat perhatian besar dari berbagai golongan di negeri Belanda yang ingin mempertahankan Irian Barat sebagai daerah jajahan Belanda. Kedudukan golongan peranakan Belanda di Indonesia dijadikan alasan yang dianggap sesuai dengan perikemanusiaan, dan ajaran agama untuk menghindari agar Irian tidak jatuh ke tangan kaum republikan yang dianggap akan merugikan kedudukan golongan peranakan Belanda (Koentjaraningrat, 1963: 81).

Pada 18 Desember 1946 diadakan konferensi di Denpasar, Bali yang bertujuan untuk mendirikan Negara Indonesia Bagian Timur. Dalam konferensi ini, wakil dari Irian Barat tidak diikutsertakan. Hal ini sejalan dengan hasil konferensi Linggajati yang memuat bahwa keterbelakangan daerah Irian Barat membutuhkan penanganan khusus sehingga membutuhkan status tersendiri. Para peserta konferensi (Nadjamudin, Zainal Abidin, E. Katoppo, dll) mengajukan suatu mosi bahwa Irian Barat harus menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur. van Mook mempertahankan politiknya dengan menyatakan bahwa kedudukan Irian Barat harus ditetapkan oleh penduduknya. Namun hingga berlangsungnya konferensi itu van Mook belum berhasil menunjuk wakil dari Irian Barat. Penerimaan mosi Nadjamudin Cs oleh van Mook menunjukkan ketidakpastian sikap Belanda dalam menentukan status masa depan Irian Barat (Koentjaraningrat, 1963: 82-83). Belanda secara implicit mengakui Irian barat sebagai bagian wilayah Indonesia, namun Belanda mempertimbangkan tuntutan untuk memisahkan Irian Barat dari Indonesia demi kepentingan peranakan Indo Belanda dan menjadikan Irian Barat sebagai tanah airnya. Ketidakpastian sikap Belanda ini membuktikan

keinginan Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia.

Sejalan dengan usaha van Mook dalam berbagai perundingan atau konferensi yang bertujuan untuk memisahkan Irian barat dari wilayah Indonesia, pejabat pemerintah Belanda yang ada di Irian Barat, Jan van Eechoud berupaya memisahkan Irian Barat dari Indonesia. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, van Eechoud membenahi administrasi pemerintahan. Pemerintah Belanda di Irian Barat, yang membutuhkan tenaga terdidik di berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, pada 1944 dibuka sekolah pamongpraja. Pada peresmian sekolah pamongpraja itu van Eechoud berkata: "Hari ini kalian dipanggil untuk terlibat dalam memerintah negeri ini, Papua Baru dilahirkan". Kemudian seorang siswa tampil dan menjawab, "Kami menyampaikan kepada anda (van Eechoud) gelar Bapak Papua, ayah dari Papua yang baru ini". Untuk melengkapi personal yang menduduki pos-pos pemerintahan di seluruh Irian Barat, maka dibuka berbagai kursus bidang pemerintahan, kesehatan, pertanian, militer dan pendidikan di Jayapura tepatnya di Kampung Harapan. Van Eechoud berpendapat bahwa kewajiban Belanda adalah untuk memajukan penduduk Irian Barat yang terbelakang karena tanggung jawab sebelum Perang Dunia II (Jan Derix, 1987: 151).

Perekrutan orang Irian Barat dalam bidang pemerintahan bukan semata-mata untuk mengisi lowongan kerja, melainkan untuk menjalankan misi untuk membangun identitas orang Papua dan membuat orang Papua setia kepada pemerintah Belanda. Hal ini terbukti dari usaha van Eechoud membangun identitas nasional orang Papua. Kebijakan tersebut menyadarkan orang Papua untuk melihat jati dirinya yang berbeda dari Indonesia lainnya. Usaha Belanda dalam memisahkan Irian Barat dari Indonesia tampak dari usulan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar yaitu ditundanya satu tahun pembicaraan mengenai status politik Irian Barat. Penundaan pembicaraan tersebut merupakan akal-akalan Belanda. Hal ini dapat diketahui dari kebijakan Belanda yang menjadikan Irian Barat sebagai suatu provinsi tersendiri dalam pemerintahan Belanda. Pada 27 Desember 1949 di Den Haag dilakukan upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia. Sementara itu, Gubernur Irian Barat, Jan P.K. van Eechoud mengumumkan proklamasi bagi

penduduk Irian Barat yang mengatakan bahwa sejak 27 Desember 1949 semua penduduk Irian Barat menjadi penduduk dari Gouvernement Nieuw Guineea, dan pemerintahan umum dilaksanakan atas nama Ratu Belanda

Belanda semakin gencar memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia karena menginginkan Irian barat sebagai Tanah Air Baru bagi kaum Indo-Belanda, Belanda totok dan penduduk pribumi di bawah naungan Kerajaan Belanda. Penempatan Irian Barat langsung dibawah Kerajaan Belanda didasarkan atas alasan bahwa penduduk Irian Barat masih sangat terbelakang dan membutuhkan bimbingan dan didikan Belanda hingga mampu memerintah diri sendiri. Belanda mempercepat persiapan kemerdekaan Irian baru, menjelang akhir tahun 1960, pemerintah Belanda membentuk beberapa partai dan organisasi atau gerakan politik sebagai perwujudan dari kebijakan politik dari Kabinet De Quay untuk mempercepat pembentukan Nieuw Guinea Raad (Dewan Irian Barat) melalui pemilihan umum, yaitu realisasi dari politik dekolonisasi untuk Nieuw Guinea yang dilakukan secara bertahap. Adapun berbagai partai dan organisasi atau gerakan politik tersebut adalah :

1. Partai nasional (Parna) yang diketuai oleh Hermanus Wayoi.
2. Democratische Volks partij (DVP) yang diketuai oleh A. Runtuboy.
3. Kena U Embay (KUD) yang diketuai oleh Essau Itaar.
4. Nasional Partai Papua (Nappa) (Anggota: NMC Tanggahma).
5. Partai Papua Merdeka (PPM) yang diketuai oleh Mozes Romainum.
6. Commite Nasional Papua (CNP) yang diketuai oleh Willem Inury.
7. Partai Orang Nieuw Guinea (PONG) yang diketuai oleh Johan Ariks.
8. Front nasional Papua (FNP) yang diketuai oleh Lodewijk Ayamiseba.
9. Eenheids Partij Nieuw Guinea (APANG) yang diketuai oleh L. Mandatjan.
10. Sama-Sama Manusia (SSM).
11. Persatuan Kristen Islam Radja Ampat (Perkisra) yang diketuai oleh M.N. Majalibit.
12. Persatuan Pemuda- Pemuda Papua (PERPEP) yang diketuai oleh A.J.F Marey.

Partai Nasional (Parna) dipimpin oleh orang yang beraliran nasionalis Papua yang menghendaki suatu pemerintahan sendiri dan secara tegas menolak penggabungan dengan Indonesia. Anggota partai ini meningkatkan propaganda anti Indonesia, mereka percaya janji

Belanda membentuk pemerintahan sendiri (kemerdekaan) pada tahun 1970. Janji ini yang menyebabkan sebagian dari pemimpin Papua tidak mengungsi ke negeri Belanda pada saat Belanda meninggalkan Irian Barat, tetapi mereka tinggal dan menerima kenyataan janji itu setelah Irian Barat digabungkan dengan Indonesia (Djopari, 1993: 33).

Keinginan Belanda untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Irian Barat, Program Papuanisasi merupakan bagian dari pembentukan Nieuw Guinea Raad yang diprogramkan selama 10 tahun agar kemerdekaan Irian barat tercapai. Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama berpacu dengan waktu untuk mencapai kepentingan masing-masing terhadap Irian barat. Indonesia berupaya menggagalkan pembentukan Negara Irian barat buatan Belanda.

Belanda berupaya mempersiapkan kemerdekaan Irian Barat meskipun waktu yang dimilikinya sudah tinggal hitungan detik. Belanda kekeuarangan waktu karena persiapan-persiapan yang dilakukan sudah terlambat. Hal ini membuktikan bahwa Belanda tidak tulus untuk memerdekakan Irian Barat, karena persiapan-persiapan kemerdekaan tidak dilakukan dari awal tahun 1950-an ketika Belanda tidak bermaksud mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia.

Pemerintah Belanda memutuskan bahwa pada tanggal 1 November 1961, bendera nasional Papua dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda dan lagu kebangsaan Papua dinyanyikan pada saat itu. Kegiatan itu mendapat publisitas dengan cepat dan meluas baik di ke penjuru dunia. Untuk kepentingan publisitas, dicetak dan dibuat bendera dalam berbagai ukuran, lagu kebangsaan, dan logo bendera dalam berbagai ukuran disebarluaskan terutama kepada seluruh masyarakat Papua mulai dari kota sampai ke kampung-kampung yang dapat dijangkau oleh aparat pemerintah. Kegiatan Komite Nasional tersebut menuai kritik dari sekelompok orang Papua, karena Komite nasional belum sepenuhnya mewakili seluruh orang Papua, dan tindakan yang dilakukan terlalu tergesa-gesa. Kelompok itu khawatir terhadap rencana Luns jika tidak diterima dalam Sidang Umum PBB (28 Oktober 1961) sehingga mereka mengajukan alternatif lain yaitu pemerintah Belanda harus menghormati janjinya pada 1960 yaitu pemberian pemerintahan sendiri atau kemerdekaan kepada bangsa Papua, dan bila perlu dibawah bimbingan

Belanda. Pada tahun 1960 Belanda membentuk Batalyon Sukarelawan Papua yang berkedudukan di Arfai- Manokwari, Irian Barat yang merupakan embrio dari Tentara Nasional Papua, yang dipersiapkan untuk menghadapi konfrontasi militer Indonesia. Persiapan konfrontasi militer Indonesia ditandai dengan dicituskannya Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta yang isinya sebagai berikut : pertama, gagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda, kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa (Djopari, 1993: 36-37).

Pertikaian antara Belanda dan Indonesia akhirnya dapat diselesaikan melalui persetujuan New York (New York Agreement) pada tanggal 15 Agustus 1962. Pada salah satu pasal persetujuan itulah yang menjadi latar belakang bagi orang Papua yang menginginkan Papua Merdeka secara mandiri. Setelah persetujuan New York, sesuai dengan pasal kedua, “ pemerintah Belanda akan menyerahkan pemerintahan kepada Badan Penguasa Pelaksana sementara Peserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Temporary Eksecutive Authority/UNTEA). Belanda bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada PBB dan melalui UNTEA pada 1 Mei 1963 diserahkan kepada Indonesia.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data melalui proses historiografi, perjalanan sejarah Papua dalam konteks Nusantara sejak zaman kerajaan kuno hingga masa kolonialisme Belanda dan perjuangan integrasi dengan Indonesia.

Sejak abad ke-7, Papua telah memiliki hubungan dengan wilayah lain di Nusantara, seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Maluku. Bukti hubungan ini terlihat dari perdagangan rempah-rempah, penyebaran Islam, dan interaksi budaya yang memperkaya identitas Papua. Kesultanan Tidore dan Ternate berperan besar dalam membawa Papua ke dalam jaringan perdagangan dan politik Nusantara. Selain itu, perkawinan campur antara pendatang dari Maluku dan Sulawesi dengan penduduk lokal menyebabkan munculnya komunitas Muslim di beberapa wilayah Papua. Belanda awalnya menyerahkan pengelolaan Papua kepada Kesultanan Tidore. Namun, seiring berjalannya

waktu, Belanda mulai menegakkan pemerintahan kolonialnya secara langsung di Papua. Salah satu momen penting adalah pendirian benteng Fort du Bus pada tahun 1828. Setelah Indonesia merdeka, Belanda berusaha mempertahankan Papua sebagai wilayahnya dengan membentuk Dewan Nieuw Guinea dan mempersiapkan Papua untuk menjadi negara mandiri. Namun, melalui upaya diplomasi dan konfrontasi militer Indonesia (Trikora), Papua akhirnya kembali ke pangkuan Indonesia melalui perjanjian New York pada tahun 1962 dan secara resmi diserahkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963.

Papua selalu menjadi bagian dari jaringan sejarah Nusantara, baik melalui perdagangan, politik, maupun interaksi budaya. Meski kolonialisme Belanda berusaha memisahkan Papua, sejarah menunjukkan bahwa Papua memiliki keterkaitan erat dengan wilayah lain di Indonesia, yang menjadi dasar bagi integrasinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **REFERENCE LIST**

- Bone, Robert C. 1958. *The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat)*. Ithaca: CornellUniversity.
- Derx, Jan. 1987. *Bapa Papoea: Jan P.K. van Eechoud, Een Biografie*. Nederlands: Uitgerij van Spijk B,V.V.
- Djopari, JRG. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Leirissa, RZ. 1996. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan sekitar Laut Seram Awal abad 19*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meteray, Bernarda. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Muridan Widjojo. 2009. *The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-Making In Maluku c.1780-1810*. Leiden: Brill.
- Rosmaida Sinaga.2013. *Masa Kuasa Belanda di Papua*. Jakarta: Komunitas Bambu.